



## Banggar Bahas Hasil Verifikasi APBD Perubahan

Bersama TAPD

# Tambahan Rp 4,9 M

## setelah Verifikasi Gubernur

Selain menyoroti soal tambahan kegiatan sebesar Rp 4,9 miliar yang masuk setelah verifikasi gubernur, juga dipersoalkan masalah hibah.

MANGUPURA, NusaBali

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2015, dibahas pada Selasa (22/9), oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Badung. Rapat dipimpin Koordinator Banggar yang juga Wakil Ketua II DPRD Badung Made Sunarta bersama Ketua TAPD Badung Kompyang R Swandika di gedung DPRD Badung.

Selain terkait pencairan dana hibah, anggota dewan juga menanyakan adanya dana tambahan belanja sebesar Rp 4,9 miliar lebih yang tanpa sepengetahuan dewan. Ketua Komisi III Nyoman Satria mengungkapkan adanya tambahan belanja yang ditempatkan pada sejumlah SKPD. Tambahan kegiatan den-



KETUA Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Badung Kompyang R Suandika (kanan) dan menghadiri pembahasan APBD Perubahan 2015 Kabupaten Badung dengan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Badung di gedung Dewan Badung, Selasa (22/9).

gan total nilai Rp 4,9 miliar ini, dimasukkan setelah verifikasi oleh gubernur.

Secara garis besar setelah melalui verifikasi gubernur, pendapatan yang awalnya dirancang Rp 3,620 triliun lebih, terkoreksi menjadi Rp 3,625 triliun. Belanja dari Rp 4,051 triliun lebih menjadi Rp 4,056 triliun lebih. Di sini ditemukan ada Rp 4,9 miliar tambahan belanja. Selain itu ada beberapa SKPD yang mendapatkan tambahan belanja, di antaranya

Bappeda Litbang sebesar Rp 393 juta, Bina Marga dan Pengairan mendapatkan tambahan Rp 6,2 miliar lebih. Ada juga beberapa SKPD yang justru anggarannya dikurangi, seperti Badan Kepegawaian Diklat Rp 1,5 miliar lebih, Disdikpora Rp 183,7 juta.

"Kami belum diberikan breakdown tambahan belanja sebesar Rp 4,9 miliar tersebut. Dan apakah boleh memasukkan kegiatan setelah verifikasi oleh gubernur," tanya Satria.

Edisi : Rabu, 23 September 2015

Hal : 2





Menanggapi berondongan pertanyaan tersebut, Kabag Keuangan Pemkab Badung I Ketut Gede Suyasa menjelaskan, tambahan belanja sebesar Rp 4,9 miliar sudah melalui penggodogan, begitu juga dengan pengurangan anggaran pada sejumlah SKPD, sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Dia mengakui tambahan kegiatan tersebut baru masuk setelah evaluasi dari gubernur. "Angka Rp 4,9 miliar inilah yang akan kita bahas sekarang, untuk breakdown-nya segera kami berikan," katanya.

Bappeda sempat menjelaskan untuk tambahan anggaran Rp 393 juta yang diarahkan untuk pembuatan data center dan pembelian mebel. Sedangkan Rp 6,2 miliar lebih pada Dinas Bina Marga diarahkan untuk kegiatan peningkatan jalan di Pererenan serta tambahan anggaran pemeliharaan jalan.

Kompyang R Swandika sempat menawarkan solusi agar dilakukan konsultasi ke provinsi, mengenai boleh tidaknya memang anggaran untuk kegiatan setelah keluarnya hasil verifikasi.

Terkait masalah hibah dan bansos juga menjadi bahan pertanyaan. Dewan tetap berharap hibah bisa dicairkan.

Ketua Komisi II Nyoman Dirga Yusa mengatakan hibah yang tengah diperjuangkan bukan untuk kepentingan pribadi dewan melainkan untuk kepentingan masyarakat. Terlebih, masyarakat telah dijanjikan akan mendapat hibah tersebut guna perbaikan pura, bale banjar, dan sebagainya. "Kami minta agar dicarikan solusi terbaik, pemerintah sebagai pemegang regulasi tidak mungkin tidak bisa menemukan jalan untuk win-win solution," ucapnya. "Yang kami inginkan adalah solusi riil," tambahnya.

Swandika menanggapi soal hibah tidak memberikan kepastian untuk dapat mencairkan dana hibah sebagai mana yang diinginkan oleh anggota DPRD Badung karena terbentur UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Namun dia akan berusaha mencari solusi terbaik sehingga tidak sampai melanggar hukum normatif.

"Kami tetap berpedoman pada hukum normatif. Namun kami akan berusaha mencari solusi terbaik untuk masalah ini. Alternatifnya hanya bisa diberikan sesuai dengan undang-undang," kata pejabat asal Kero-bokan, tersebut. **as**





# Bonus Atlet Masih Gabeng

Di APBD Perubahan tahun 2015, belum terlihat ada pos untuk bonus para atlet yang berprestasi di Porprov. Sementara kebutuhan dana bonus tersebut cukup besar mencapai Rp 4-5 miliaran.



• DOK NUSABALI

PARA atlet berdefile saat pembukaan Porprov 2015 beberapa waktu lalu.

SINGARAJA, NusaBali

Para atlet berprestasi pada ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Bali ke XII, dipastikan mendapat bonus. Hanya saja, sejauh ini berapa nilai bonus bagi atlet peraih medali emas, perak dan perunggu masih belum jelas.

Informasi yang dihimpun, Pemkab Buleleng tetap akan memberikan bonus para atlet berprestasi pada ajang Porprov Bali ke XII. Apalagi, pencapaian kontingen Buleleng di ajang Porprov tahun ini cukup membanggakan sebagai peringkat ketiga dan sebagai

kontingen favorit. Konon bonus yang diberikan bagi para atlet meningkat dibanding ajang yang sama dua tahun lalu. Dua tahun lalu, bonus bagi atlet berprestasi bekisar Rp 10 sampai Rp 15 juta.

Namun hasil penelusuran NusaBali, ternyata bonus para atlet berprestasi pada ajang Porprov tahun ini, belum dialokasikan. Pada APBD Perubahan tahun 2015, belum terlihat ada pos untuk bonus para atlet. Kemungkinan hal itu terjadi karena kebutuhan dana untuk bonus tersebut cukup besar mencapai sekitar Rp 4 sampai Rp 5 miliar. Sehingga pemberian bonus itu

kemungkinan baru direalisasikan pada tahun 2016 nanti.

Wakil Bupati Buleleng Nyoman Sutjidra yang dikonfirmasi, Selasa (22/9) mengaku, belum mendapat informasi menyangkut bonus para atlet tersebut. Dia juga mengaku belum mengetahui, apakah dana bonus para atlet sudah dialokasikan di APBD Perubahan atau belum. "Belum dapat konfirmasi (apa sudah dialokasikan atau belum, red). kalau soal APBD Perubahan, coba dengan pak Sekda. Kan pak Sekda yang koordinir penyusunan APBD itu," katanya.

Sekkab Buleleng Dewa Ke-

Edisi : Rabu, 23 September 2015

Hal : 4





Sambungan - - -

tut Puspaka yang dikonfirmasi semalam juga belum bisa memberikan informasi lebih lanjut karena saat dikontak, Puspaka mengaku masih ada acara persembahyangan.

Sementara Ketua KONI Buleleng, Nyoman Arta Widnyana yang dikonfirmasi terpisah, pihaknya sangat berharap para atlet yang berprestasi di ajang Porprov Bali ke XII mendapat bonus. Hanya saja, berapa nilai yang pantas bagi para atlet berprestasi itu, KONI kata Arta Windyana menyerahkan sepenuhnya pada kebijakan Pemkab Buleleng.

Karena pemberian bonus itu disesuaikan dengan katagori, seperti perseorangan dan beregu. "Tentu nanti kami akan buat berbagai alternatif pilihan (nilai bonus, red). Kemungkinan ada tiga alternatif yang kami ajukan, sehingga bisa menjadi acuan bagi Pemkab dalam pemberian bonus itu," terangnya. Di sisi lain, Wabup Nyoman Sutjidra mengatakan Buleleng siap bila dipercaya kembali menjadi tuan rumah pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) ke-13 pada 2017 mendatang. "Kami siap ditunjuk kembali apabila Kabupaten Gianyar tidak bersedia menggelar pekan olahraga terbesar di Bali itu," kata Sutjidra

dilansir Antara.

Ia menjelaskan, kesiapan Buleleng menyelenggarakan kembali Porprov bukan tanpa alasan, kesiapan SDM penyelenggara dan fasilitas infrastruktur keolahragaan yang baik menjadi alasan utama siap menyaksikan Porprov ke-13 mendatang.

"Kami siap sekali seandainya ditunjuk kembali oleh Pemerintah Provinsi menyelenggarakan Porprov, kami siap 100 persen," kata dia.

Sutjidra menilai, kesiapan SDM Buleleng menata dan mengatur Porprov tidak diragukan lagi. Bahkan, pada pelaksanaan Porprov ke-12 beberapa waktu lalu, Buleleng mendapatkan penilaian dari Kementerian Pemuda dan Olahraga RI dan mendapatkan nilai baik, yakni nilai sembilan.

Ia menambahkan, berkaitan masalah infrastruktur, terdapat beberapa sarana keolahragaan yang memiliki standar baik dan sesuai standar yang ditentukan masing masing cabang olahraga.

"Kami punya kolam renang berstandar internasional, Gedung Olahraga Buwana Patra dan Universitas Pendidikan Ganesha yang cukup mumpuni dan tidak lupa Stadion Mayor Metra," kata dia. **k19**





## GOR Bermasalah Hukum Direnovasi, Kadisdik Ngaku Tidak Mengetahui

BANGLI, NusaBali

Kegiatan servis bangunan dan pemolesan terhadap GOR Susut yang masih dalam belitan kasus hukum yang dilakukan pihak sekolah dengan menggunakan dana komite sekolah, sejauh ini belum diketahui secara pasti oleh pihak Disdikpora Bangli. Malahan, pihak Disdikpora tidak tahu-menahu mengenai status GOR yang berlokasi di SMAN 1 Susut, Bangli tersebut. Apakah GOR itu sudah menjadi aset daerah atau tidak. "Kita tidak mengetahui kalau ada kegiatan servis pada GOR tersebut. Karena kepala sekolahnya baru melaporkan pada kami setelah pekerjaan hampir tuntas," ujar Kadisdikpora Bangli, I Nyoman Suteja, saat dikonfirmasi, mengatakan, Selasa (21/9).

Kata dia, pihak sekolah melakukan kegiatan ini berdalih kalau bakal ada lomba di sekolah. Jadi GOR ini bakal dimanfaatkan untuk lokasi penyelenggaraan lomba itu. Namun, Kasek justru tidak mengetahui lebih jelas, soal penanganan GOR ini oleh pihak kejaksaan negeri Bangli. "Sesuai dengan aturan kalau memang masih menjadi barang bukti (BB) penyelidikan kasus, tentu belum boleh diutak-atik dulu. Apa yang dilakukan pihak sekolah, saya kira akibat kurangnya pemahaman pihak sekolah atas kasus yang tengah menggelinding saat ini," ujar Suteja.

Ditanya soal pertanggungjawaban dana komite sekolah untuk biaya servis GOR, kata dia, setiap penggunaan dana memang mesti dipertanggungjawabkan. Namun, pihaknya menyayangkan kalau Kasek baru melapor setelah pekerjaan hampir kelar. Kalau pihak sekolah melapor sebelum kegiatan dimulai, pihaknya tentu bakal memberikan pemahaman kepada pihak sekolah. "Untuk itu kita berjanji akan turun ke lokasi untuk melakukan pengecekan. Apabila kegiatan belum selesai, kita siap untuk menghentikannya," tegasnya.

Sementara Kasi Pidsus Kejari Bangli, Bagus Putra, belum bisa dikonfirmasi terkait dengan kelanjutan penanganan kasus GOR Susut. Apakah, pihaknya sudah turun ke lokasi, pasca adanya servis terhadap GOR yang kini menjadi objek penyelidikan kasus dugaan korupsi pembangunan gedung bantuan pusat itu. Saat dikonfirmasi via sms, juga belum dapat jawaban. Namun sebelumnya, yang bersangkutan menyebutkan bakal kembali membuka kasusnya, yang telah masuk BPKP tersebut. **cr53**

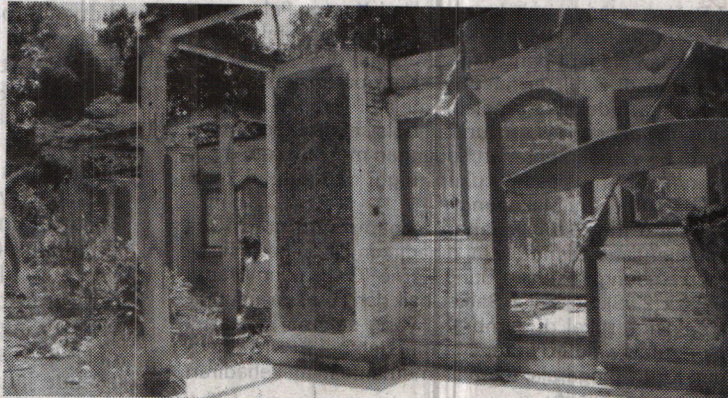
Edisi : Rabu, 23 September 2015

Hal : 8





## Hotel Balina Ambruk, ✓ Pemekab Sertifikatkan Aset



• NUSABALI/NANTRA

BEKAS Hotel Balina, asetnya dalam penyertifikatan milik Pemkab Karangasem.

AMLAPURA, NusaBali

Hotel Balina yang sempat berkiar pada masa pariwisata Orde Baru dan telah enam tahun ambruk, berada di lahan milik Pemkab Karangasem. Karena itu, Pemkab ambalialih lahan, seluas 48 are di pantai Buitan, Desa/Kecamatan Manggis ini. Kini lahan ini, tidak lagi difungsikan untuk aktivitas pariwisata, dan dalam proses penyertifikatan.

Lahan telah terdata, dan dalam proses penyertifikatan lahan. Kadis Budaya dan Pariwisata Karangasem I Wayan Purna, menegaskan hal itu di Amlapura, Selasa (22/9).

Purna mengatakan, pendataan aset untuk menyelamatkan aset Pemkab Karangasem karena tidak lagi terpakai. Sehingga menjadi jelas, dikuatkan sertifikat. Sebab, Hotel Balina dibangun di zaman Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Soesilo Soedarman, tahun 1988-1993 dan di zaman pemerintahan Bupati Karangasem I Gusti Ketut Yudhana (1979-1989), pusat membantu bangunan hotel.

Selanjutnya sacralisan, Pemprov Bali melalui Gubernur Bali Ida

Bagus Oka menyerahkan aset hotel ke Pemkab Karangasem, Pemkab mengontrakkan ke PT Panca Marga tahun 1980-2010. Pihak PT Panca Marga memperluas bangunan dengan mencarikan lahan milik warga masyarakat, sehingga luasnya mencapai 100 are dan berakhir tahun 2010. Sejak itu bangunan terbengkalai dan ambruk, tinggal dinding-dinding bangunan saja.

"Makanya kami perlu mengamankan aset, dalam waktu dekat menerbitkan sertifikat, lengkap dengan membangun batas-batas lahan di lapangan," katanya.

Kabag Perlengkapan Setdakab Karangasem I Nyoman Dani dihubungi terkait penyertifikatan lahan, dihubungi tidak ada nada sambung. Sehingga belum didapatkan informasi sejauh mana hasil pendataan dan penyertifikatan lahan itu. Apalagi lahan di penginapan Objek Wisata Putung, banjar Putung, Desa Duda Timur, Kecamatan Selat, telah tuntas penyertifikatannya. Tinggal menunggu anggaran untuk menggelar tender pengelolaan. **k16**

Edisi : Rabu, 23 September 2015

Hal : 8





## Kontraktor Gedung Aset Terancam Sanksi DCK

MANGUPURA, NusaBali

Gedung aset yang digarap oleh Dinas Cipta Karya (DCK) Badung masih dalam proses pembangunan. Padahal, gedung yang bersebelahan dengan tempat pengolahan sampah milik DKP Badung itu harus sudah diserahkan oleh kontraktor pada 26 September 2015. Bila sampai batas waktu yang ditentukan proyek belum juga diserahkan, DCK mengancam akan menjatuhkan sanksi.

Dari pantauan, Selasa (22/9), ada dua gedung yang berdiri di sebelah selatan Puspem Badung ini. Selain berdekatan dengan tempat pengolahan sampah, gedung aset tersebut juga berdekatan dengan Depo Arsip. Walaupun waktu terbilang mepet, beberapa pengerjaan seperti pemavingan halaman belum juga beres. Selain ada dua gedung, ada juga satu bangunan wantilan. Wantilan ini nanti akan jadi tempat pelelangan bilamana ada aset pemerintah yang dihapuskan.

Kepala Dinas Cipta Karya (DCK) Kabupaten Badung, Ni Putu Dessy Dharmayanty, mengatakan memberikan kesempatan kepada kontraktor sampai 26 September untuk menyelesaikan proyek. Tapi jika waktu yang tersisa tak dipergunakan dengan baik, kontraktor hendaknya siap-siap kena denda.

"Kasih kesempatan pada kontraktor. Bila sampai tanggal 26



● NUSABALI/ARI SISWANTO

GEDUNG Aset di lingkungan Puspem Badung Mangupura Mandala.

September belum beres, ya kami kenai denda," tegas pejabat asal Denpasar, itu.

Rencana setelah penyerahan gedung ke DCK, baru setelah itu akan dilakukan serah terima kepada Bagian Aset Pemkab Badung. "Namun gedung masuk dalam pengawasan DCK selama masa pemeliharaan. Masa pemeliharaan selama enam bulan, gedung itu tetap menjadi tanggung jawab kontraktor," jelas Dessy.

Dessy mengaku tak hafal berapa anggaran pembangunan gedung aset tersebut. Menurutnya, gedung aset ini dipergunakan menempatkan aset-aset milik Pemkab Badung sebelum pelelangan. Selama ini

kalau ada lelang, calon pembeli kebingungan, sebab barangnya terpecar-pencar. Dengan adanya gedung baru tersebut diharapkan penataan aset yang masuk pelelangan terdata dengan baik.

Gedung sebelah barat rencananya digunakan untuk memajang mobil dan sepeda motor, sedangkan gedung sebelah timur untuk komputer dan benda mebel. "Jadi nanti lelang barang semua dipusatkan di gedung aset yang baru," imbuhnya.

Terkait dengan pengamanan gedung sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab petugas keamanan puspem. Gedung juga akan mendapatkan penjagaan ketat. **as**

Edisi : Rabu, 23 September 2015

Hal : 2





## Pj Bupati Tinjau Proyek Fisik Badung Selatan



• NUSABALI/YUDA

PENJABAT Bupati Badung I Nyoman Harry Yudha Saka (ketiga dari kiri) berbincang dengan beberapa guru saat meninjau perkembangan pembangunan ruang kelas baru di SDN 6 Pecatu, Kuta Selatan, Badung, Selasa (22/9).

MANGUPURA, NusaBali

Penjabat Bupati (Pj) Badung I Nyoman Harry Yudha Saka blusukan memantau sejumlah proyek fisik di kawasan Badung Selatan. Peninjauan ini dilakukannya usai membuka job fair 2015 di Kampus Unud Jimbaran, Selasa (29/9).

Didampingi Kadis Cipta Karya Ni Luh Desy Dharmayanty, Kabag Pembangunan AA Kumara beserta staf, Camat Kuta Selatan I Wayan Wirya, Lurah Jimbaran Ketut Rimbawan, langsung melakukan peninjauan ke sejumlah proyek yang didanai APBD Badung tahun 2015 di wilayah Badung Selatan. Sidak ini dilakukan, guna memastikan pelaksanaan proyek APBD 2015 maupun proyek tahun jamak dapat berjalan dengan baik.

Ada enam proyek yang menjadi fokus kunjungan di antaranya pembangunan drainase dan trotoar ruas Jalan Simpang Unud-Simpang Poltek, penambahan infrastruktur air bersih di Badung Selatan, pembangunan RKB SMPN 5 Kuta Selatan, peningkatan jalan, drainase, dan trotoar Pantai Pandawa, pembangunan RKB SD No 6 Pecatu, dan pembangunan Jembatan Labuan Sait-Suluban.

Tak banyak komentar yang diberikan. Namun birokrat asal Buleleng itu menegaskan sidak proyek ini untuk mengetahui sejauh mana progres dari pengerjaan proyek tersebut. "Pelaksana proyek agar betul-betul memperhatikan kualitas bangunan serta batas waktu pengerjaannya," pesannya.

Hal yang terpenting lainnya yang ditekankan adalah pembangunan tersebut harus terdapat arsitektur Bali. as

Edisi : Rabu, 23 September 2015

Hal : 2





## Semua Jenis Pembangunan di DTW Jatiluwih Di-Status Quo-kan

TABANAN, NusaBali

Pemprov Bali ambil langkah strategis untuk hentikan polemik kasus bulldoser lahan hijau buat kepentingan parkir di Daya Tarik Wisata (DTW) Jatiluwih, Desa Jatiluwih, Kecamatan Penebel, Tabanan. Berdasarkan rapat koordinasi di Kantor Gubernur Bali, Niti Manndala Denpasar, Selasa (22/9), diputuskan untuk stop pembangunan apa pun di DTW Jatiluwih, sampai nanti ada Rencana Detail

Tata Ruang (RDTR) terkait kawasan subak yang juga masuk Warisan Budaya Dunia (WDB) tersebut.

Rapat koordinasi terkait kisruh DTW Jatiluwih yang digelar di Kantor Gubernur, Selasa seiang, dipimpin Asisten II Setda Provinsi Bali I Ketut Widja. Hadir pula Kadis Kebudayaan-Pariwisata (Budpar) Tabanan Wayan Adnyana, Ketua Puslit Subak Unud Prof Dr Ir Wayan Windia, dan staf lainnya.

Dari rapat koordinasi tersebut, diputuskan tidak boleh ada pembangunan apa pun di WBD Subak Jatiluwih, sebelum adanya RDTR. Nantinya, Asisten II Setda Provinsi Bali Ketut Widja akan bertemu Gubernur Made Mangku Pastika untuk membentuk Badan pengelola WBD. Hal ini diakui Prof Wayan Widia dalam releasenya kepada NusaBali, Selasa kemarin.

Bersambung ke Hal-15 Kolom 1





Sambungan

## Semua Jenis Pembangunan di DTW Jatiluwih...

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

Disebutkan Prof Windia, para petani di WBD Subak Jatiluwih direkomendasikan untuk bebas dari pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta mendapatkan bantuan seekor sapi. "Bulan depan, utusan dari UNESCO akan terjun ke Jatiluwih untuk melakukan checking," jelas pakar subak dari Departemen Sosial dan Ekonomi Fakultas Pertanian Unud ini.

Dikonfirmasi NusaBali secara terpisah, Kadis Budpar Tabanan Wayan Adnyana juga membenarkan dirinya ikut hadir rapat koordinasi untuk membahas masalah DTW Jatiluwih di Kantor Gubernur Bali, Selasa kemarin. Senada dengan Prof Windia, Wayan Adnyana menyatakan semua pembangunan yang dianggap melanggar di DTW Jatiluwih di-status quo-kan.

"Sebelum ada RDTR, segala pembangunan di DTW Jatiluwih harus dihentikan. Untuk membuat RDTR, harus ada masukan dari provinsi dan UNESCO," terang Adnyana.

Dia menegaskan, pembangunan dalam bentuk apa pun di DTW Jatiluwih harus ada rekomendasi dari UNESCO. Soalnya, DTW Jatiluwih telah ditetapkan badan dunia

UNESCO sebagai WDB sejak tahun 2012 silam, bersama dua situs lainnya di Bali, yakni Pura Taman Ayun (di Desa Pakraman Mengwi, Kecamatan Mengwi, Badung) dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Pakerisan di wilayah Gianyar.

Menurut Adnyana, nantinya dalam RDTR itulah akan dijabarkan mana kawasan di DTW Jatiluwih yang boleh didirikan bangunan dan mana pula tidak boleh dilakukan pembangunan. Prinsip dikeluarkannya status WBD oleh UNESCO, kata dia, adalah pemberdayaan perekonomian masyarakat dan pelestarian lingkungan.

"Jangan sampai setelah mendapat status WBD, lingkungan di DTW Jatiluwih malah rusak dan pemberdayaan masyarakat tidak ada," tandas Adnyana. Dia menambahkan, pihak Provinsi Bali, Puslit Subak Unud, dan UNESCO sudah siap turun ke DTW Jatiluwih untuk memberikan masukan pembuatan RDTR.

Sayangnya, Kepala Desa (Perbekel) Jatiluwih, I Nengah Kartika, belum bisa dikonfirmasi NusaBali terkait keputusan rapat koordinasi di Kantor Gubernur Bali yang stop segala bentuk pembangunan di DTW Jatiluwih. Demikian pula Bendesa Adat Jatiluwih, Wayan

Yasa, belum bisa dikonfirmasi. Saat dihubungi per telepon kemarin, ponsel mereka dalam keadaan tidak aktif.

Sementara itu, Ketua Puslit Subak Unud Prof Wayan Windia sebelumnya sempat menyarankan semua stakeholder pariwisata dan pencinta lingkungan untuk memboikot kunjungan ke DTW Jatiluwih. Secara khusus, Prof Windia meminta kepada pihak ASITA buat sementara tidak merekomendasi kunjungan wisatawan ke DTW Jatiluwih.

Menurut Prof Windia, ajakan boikot itu dimaksudkan untuk tidak ikut serta merusak alam Jatiluwih. Dikatakannya, pembulldosiran kawasan Subak Jatiluwih untuk kepentingan parkir bertentangan dengan ketentuan UNESCO. Semua restorasi dan pembangunan di kawasan WBD haruslah mengacu kepada WHC Operational No 172.

Bahwa, dalam proses pembangunan di kawasan WBD harus melapor dulu kepada UNESCO. Selanjutnya, pihak UNESCO akan memberikan saran tentang apa yang harus dilakukan, agar tidak mengganggu konsep *Outstanding Universal Value* (OUV) dari sistem subak.

Pembulldosiran yang dilakukan di kawasan Subak Jatiluwih juga dianggap bertentangan dan tidak mengacuhkan nasihat yang diberikan Tim Monev Konsultan UNESCO. Karena laporan pihak ketiga terkait kondisi di Jatiluwih, maka konsultan UNESCO yakni ICOMOS dan ICCROM telah melakukan monev di kawasan DTW Jatiluwih, 12-16 Januari 2015 lalu.

"Hasilnya, sudah keluar bahwa pihak UNESCO sangat mengkhawatirkan pembangunan parkir di Subak Jatiluwih, karena akan mengganggu OUV di kawasan itu. Pihak UNESCO juga tidak setuju usulan untuk membangun hotel di kawasan tersebut dan meminta untuk dibangun home stay di rumah-rumah penduduk setempat," tandas Prof Windia, Jumat (18/9) lalu.

Menurut Prof Windia, pembangunan parkir dan lainnya di kawasan Subak Jatiluwih juga bertentangan dengan kesepakatan yang diambil ketika diadakan sosialisasi di sana, sebulan lalu. Bahwa yang perlu terlebih dahulu dikerjakan Pemkab Tabanan adalah membuat RDTR Jatiluwih. Dengan demikian, akan jelas apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan di kawasan itu. **k21**





Sidang Dugaan Korupsi Jembatan di Lemukih, Buleleng ✓

## Eks Kadis PU Buleleng Dibentak Hakim

DENPASAR, NusaBali

Sidang dugaan korupsi Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api di Desa Lemukih, Sawan, Buleleng dengan terdakwa Hj Aristya Agustina (rekanan) dan I Wayan Wenten (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) menghadirkan saksi Nyoman Yasa yang menjabat sebagai Kepala Dinas PU (Pekerjaan Umum) Buleleng saat proyek dilakukan. Dalam sidang, Yasa yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini beberapa kali ditegur hakim karena tidak kooperatif.

Majelis hakim pimpinan Beslin Sihombing awalnya menegur Yasa saat ditanya awal kasus ini terjadi mulai pemenangan tender oleh CV Aristya Ayu hingga macetnya proyek. Namun dengan polos Yasa mengatakan tidak tahu apa-apa, karena itu semua tugas PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan PPTK. "Saya tidak tahu," ujar Yasa di hadapan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Ketut Sujaya dkk.

Hakim Beslin langsung naik pitam dan membentak Yasa, karena kerap mengatakan tidak tahu dan menyalahkan anak buahnya sendiri. "Anda sebagai Kadis kok

jawabnya seperti itu. Saya dari pagi sampai sore belum makan. Apa gunanya mendengar jawaban ini," ujar Beslin dengan nada tinggi.

Usai mendapat bentakan dari hakim, Yasa mulai buka-bukaan terkait kasus ini. Bahkan ia mengakui sempat menyetujui peralihan dari pemenang tender PT Aristya Ayu Prima ke kontraktor lainnya. Yasa beralasan menyetujui peralihan ini karena kasihan dengan terdakwa Aristya sebagai pemenang tender. "Saya kasihan karena dia cewek, tapi medannya berat sekali," ujarnya.

Beslin lalu menanyakan soal pembayaran proyek yang baru kelar 23 persen tapi diakui 45 persen. "Kenapa yang mengerjakan kontraktor lain tapi pembayaran tetap dikasih ke Aristya," tanya Beslin yang tidak mampu dijawab oleh Yasa. Selain Yasa, turut dihadirkan saksi dari Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), Dewa Merjaya. Dalam keterangannya, Dewa mengaku tidak pernah mengecek proyek tersebut ke lapangan. Ia beralasan tidak pernah diminta rekanan untuk mengecek proyek. **rez**

Edisi : Rabu, 23 September 2015

Hal : 5





## Sidang Dugaan Korupsi Prona Buleleng Dua Sekdes Diperiksa, Keterangannya Bertolak Belakang

DENPASAR, NusaBali

Kasus dugaan korupsi Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria) di Sumberkima, Gerokgak, Buleleng pada, Selasa (22/9) memasuki agenda pemeriksaan terdakwa. Dalam sidang, terdakwa I Gede Kardin Yudiasa yang merupakan Sekdes Pejarakan, kembali menyeret camat serta pejabat BPN (Badan Pertanahan Negara) Buleleng. Sementara Sekdes Sumberkima, Ketut Wirten malah pasang badan dan menyebut menggunakan sendiri uang hasil pungutan warga.

Dalam sidang pemeriksaan terdakwa Kardin yang dipimpin majelis hakim pimpinan Achmad Peten Sili, terdakwa kembali bernyanyi dan menyebut orang-orang yang ikut menikmati uang korupsi hasil pungutan warga yang ingin menyertifikatkan tanahnya. Kardin yang diperiksa mengaku diberi kewenangan Sekdes Sumberkima yang juga Ketua Panitia Prona, Wirten untuk membagikan uang kepada camat dan pejabat BPN pada 2008.

Seperti saat menjadi saksi untuk terdakwa Wirten, Kardin dalam sidang mengaku seluruh uang yang dipungut dari warga untuk membuat sertifikat sebesar Rp 600 ribu dipegang oleh tim kecil Prona dengan Ketua Panitia, Wirten. Dari uang Rp 600 ribu tersebut, Kardin diserahteruskan Rp 300 ribu untuk dibagikan ke atas.

Saat diminta merinci siapa saja yang menerima uang dari 267 warga pembuat pronas tersebut, Kardin dengan gamblang menjelaskannya. Ia menyebut Camat Gerokgak, Susrama menerima Rp 55 ribu dikalikan 267 sertifikat, Ariasa menerima Rp 50 ribu dikalikan

267 sertifikat, Ardana menerima Rp 15 ribu dikalikan 267 sertifikat dan Erwin (staf BPN lainnya, red) menerima Rp 35 ribu.

Namun ada yang berbeda dengan keterangan Kardin saat diperiksa sebagai terdakwa. Jika sebelumnya ia mengaku atas inisiatifnya sendiri membagikan uang ke camat dan pejabat BPN, kali ini Kardin mengaku uang tersebut dibagikan atas permintaan yang bersangkutan. "Jadi saya bagi berdasarkan permintaan camat, dan pejabat-pejabat BPN," jelasnya.

Sementara itu, dalam pemeriksaan Sekdes Sumberkima, Wirten berbeda jauh dengan pemeriksaan Kardin yang dengan gamblang merinci siapa saja penerima uang haram tersebut. Wirten yang diperiksa majelis hakim pimpinan Beslin Sihombing mengatakan tidak pernah membagikan uang kepada camat ataupun pejabat BPN.

Bahkan pada 2009, Wirten mengaku mengurus sendiri semua uang pungutan ke warga hingga sertifikat keluar. "Waktu 2008 sebagian uang saya hasil pungutan ke warga saya serahkan ke Kardin sebagai kordinator kecamatan. Untuk 2009 saya sendiri yang mengurus semuanya," jelas Wirten.

Hakim sempat mengingatkan Wirten supaya tidak pasang badan dan menyembunyikan orang-orang yang menerima aliran uang tersebut. "Anda jangan sok jadi pahlawan menyembunyikan orang-orang yang terima uang. Nanti anda yang menanggung semua," ujar hakim anggota Haryono. Sidang akan dilanjutkan, Selasa (29/9) untuk pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum. **rez**

Edisi : Rabu, 23 September 2015

Hal : 5





## Kisruh Honor KPU-Panwaslu Bangli Berakhir

★ Penjabat Bupati Pastikan Revisi SK Bupati Sebelumnya

BANGLI, NusaBali

Penjabat Bupati Bangli, Dewa Gede Mahendra Putra, benar-benar menepati janjinya untuk menandatangani revisi terhadap SK Bupati Bangli No 900 tahun 2015 tentang penetapan honor penyelenggara Pemilu di Bangli. SK tersebut sebelumnya menuai protes para anggota KPU dan Panwaslu Bangli, karena menetapkan honor yang dinilai kecil, apalagi jumlah tersebut berbeda dengan honor serupa pada daerah lainnya di Bali yang juga gelar Pilkada.

"Kami sudah tandatangani SK pengembalian honor tersebut, seperti yang sudah ditargetkan sebelum, Rabu (23/9) hari ini sudah kelar," ujar Penjabat Bupati Bangli, Dewa Mahendra. Menurutnya keputusan yang diambilnya mengacu pada SK Provinsi Bali No 270.5/8070/HK tentang standar harga kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah yang salah satu klausulnya mencabut SK Bupati Bangli No 900 tahun 2015 yang menetapkan honor penyelenggara Pemilu Rp 2.500.000 untuk Ketua dan Rp 2.000.000 untuk

anggota.

Dalam surat tersebut, juga ditetapkan honor penyelenggara pemilu dikembalikan sesuai usulan KPU dan Panwaslu sebelumnya. Sehingga, honor yang diberikan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebesar Rp 6,5 juta untuk ketua dan untuk anggota sebesar Rp 5,5 juta, sama dengan enam kabupaten/kota di Bali yang menyelenggarakan Pilkada serentak 9 Desember mendatang.

Kata dia, sejatinya dana itu bisa mencukupi dalam memenuhi penyelenggaraan Pilkada Bangli, seperti untuk membayar honor penyelenggara dan memberikan dana keamanan Polisi dan TNI. belum lagi ditambahkan

dengan dana hibah dan anggaran perubahan tahun anggaran 2015 yang dijadwalkan bakal disahkan paling lambat, Rabu (23/9) hari ini.

Sementara, Ketua KPUD Bangli, I Dewa Agung Lidartawan, dikonfirmasi terpisah, mengatakan sejauh ini kisruh honor penyelenggara Pilkada tidak berdampak signifikan terhadap persiapan menjelang Pilkada. "Jadi apa yang sudah kita rencanakan dalam kaitannya persiapan Pilkada selama ini sudah berjalan dengan lancar," ujarnya singkat. Sebelumnya diberitakan anggota KPU dan Panwaslu di Bangli akan mundur, jika besaran honor mereka tidak direvisi. **cr53**

### KISRUH HONOR PENYELENGGARA PILKADA BANGLI

- Honor Penyelenggara Pilkada (KPU dan Panwaslu) Bangli berdasarkan SK Bupati Bangli No 900 tahun 2015, yakni Rp 2.500.000 untuk Ketua dan Rp 2.000.000 untuk anggota.
- Honor Penyelenggara Pilkada (KPU dan Panwaslu) Bangli berdasarkan SK revisi dan mengacu SK Provinsi Bali No 270.5/8070/HK tentang standar harga kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah. Honor ditetapkan sebesar Rp 6,5 juta untuk ketua dan untuk anggota sebesar Rp 5,5 juta.